ABSTRAK

Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Opini Audit pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur

Kezia Abigail Maharani Theodoris

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan yang diukur menggunakan rasio kemandirian, efektivitas, dan efisiensi serta sistem pengendalian internal melalui jumlah temuan pemerintah terhadap opini audit pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk melihat pengaruh dari kinerja keuangan dan sistem pengendalian internal terhadap opini audit. Metodologi yang digunakan adalah regresi logistik dengan data sekunder dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019–2023 yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan NTT. Hasil penelitian menunjukkan rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi tidak berpengaruh signifikan sedangkan sistem pengendalian internal dan semua variabel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap opini audit. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas sistem pengendalian internal merupakan faktor yang lebih dominan dalam menentukan opini audit, meskipun kinerja keuangan daerah juga memainkan peran penting dalam konteks ini.

Kata kunci: *Opini Audit, Rasio Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi, Sistem Pengendalian Internal.*

ABSTRACT

The Influence of Government Financial Performance and Internal Control on Audit Opinions of Regency and Municipal Governments in East Nusa Tenggara

Kezia Abigail Maharani Theodoris

The purpose of this paper is to analyze the influence of financial performance ratios, namely independence, effectiveness, and efficiency, as well as internal control systems on audit opinions of local governments in the province of East Nusa Tenggara, Indonesia. This study employs a quantitative approach to examine the effect of financial performance and internal control systems on audit opinions. The methodology includes logistic regression analysis using secondary data from Audit Reports (LHP) of Local Government Financial Statement (LKPD) for 2019-2023, obtained from the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI), NTT Representative Office. The results of the study show that the independence ratio, effectiveness, and efficiency do not have a significant effect, while the internal control system and all variables simultaneously have a significant effect on the audit opinion. These findings indicate that the quality of the internal control system is a more dominant factor in determining the audit opinion, although the financial performance of the region also plays an important role in this context.

Keywords*: audit opinion, financial performance, internal control system, local government*

MOTTO

"Flow freely, Strive truly"

PERSEMBAHAN

Kepada Tuhan Yesus Kristus, kupersembahkan skripsi ini sebagai syukur untuk kasih yang berlimpah, tuntunan yang tak terhingga sehingga peneliti mampu melalui setiap proses yang ada

Untuk diri sendiri, terima kasih tetap bertahan, berjuang dan percaya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik

Keluarga terkasih, Bapa Indra, Ibu Sofy, dan Adik Adi terima kasih atas kasih, doa dan dukungan, dalam suka maupun duka sehingga berhasil pada titik ini

Ibu Herly dan Ibu Eve selaku dosen pembimbing, Ibu Febi selaku dosen penguji, atas bimbingan, arahan, kesempatan, serta ilmu berharga yang diberikan selama proses penyusunan skripsi

Almamater tercinta, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana atas segala cerita, pengalaman, dan kesempatan indah yang diperoleh selama menempuh pendidikan di sini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan hasil penelitian ini dengan judul "Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Opini Audit pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur". Hasil penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana akuntansi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa segala sesuatu yang dilakukan dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih kepadadanya dukungan, bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. drh. Maxs U. E. Sanam, M.Sc selaku Rektor Universitas Nusa Cendana.
2. Dr. Apriana H. J. Fanggidae, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Nusa Cendana.
3. Yohana F. Angi, SE., M.AKS selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana dan Dosen Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, kritik, dan saran dan masukan yang baik dalam penyusunan tugas akhir ini..
4. Herly M. Oematan, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, kritik dan saran dalam penyusunan tugas akhir ini.
5. Eve Ida Malau, S.Pd., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, kritik dan saran dalam penyusunan tugas akhir ini.

6. Sarlin P. Nawa Pau, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu mendukung dan membantu peneliti dalam masa studi.
7. Semua dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana, terkhususnya Dosen Program Studi Akuntansi dan Pak Santhino Mangikini, SH selaku Pegawai Program Studi Akuntansi yang telah membantu selama proses penyusunan proposal penelitian ini.
8. Keluarga terkasih Bapak Indra dan Ibu Sofy, serta adik Adi atas segala bentuk dukungan dan doa terbaik yang diberikan kepada peneliti dalam penyelesaian tugas akhir ini.
9. Teman-teman kelas B yang telah membantu dalam doa dan dukungan terkhususnya Arlen, Minshy, Tasya, dan Queen.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu secara langsung dan tidak langsung dalam penyusunan penelitian ini.

Peneliti menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga segala bentuk kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan proposal ini. Semoga proposal ini dapat membantu dan memberikan manfaat bagi para peneliti selanjutnya.

Kupang, November 2025

Peneliti

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **ii**
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iii**
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
ABSTRACT ..... **vi**
MOTTO ..... **vii**
PERSEMBAHAN ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Manfaat Penelitian 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **8**
2.1 Kajian Teoritis 8
2.1.1 *Agency Theory* 8
2.1.2 Laporan Keuangan Sektor Publik 10
2.1.3 Kinerja Keuangan Pemerintah 12
2.1.4 Sistem Pengendalian Internal (SPI) 16
2.1.5 Opini Audit 17
2.2 Kajian Empirik 19
2.3 Kerangka Berpikir 20
2.4 Hipotesis Penelitian 21
2.4.1 Pengaruh rasio kemandirian terhadap opini audit 21
2.4.2 Pengaruh rasio efektivitas terhadap opini audit 22
2.4.3 Pengaruh rasio efisiensi terhadap opini audit 22
2.4.4 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap opini audit 23
2.4.5 Pengaruh Rasio Kemandirian, Rasio Efisiensi, Rasio Efektivitas dan Sistem Pengendalian Internal terhadap opini audit. 23
BAB III METODE PENELITIAN **25**
3.1 Pendekatan Penelitian 25
3.2 Jenis Penelitian 25
3.3 Jenis dan Sumber Data 25
3.3.1 Jenis Data 25
3.3.2 Sumber Data 26

3.3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 26
3.4 Definisi Operasional Variabel 26
3.5 Populasi dan Sampel 27
3.5.1 Populasi 27
3.5.2 Sampel 28
3.6 Teknik Pengumpulan Data 28
3.7 Teknik Analisis Data 28
3.7.1 Statistik Deskriptif 28
3.7.2 Uji Regresi Logistik 28
3.7.3 Uji *Goodness of Fit* (Uji Kelayakan Model) 29
3.7.4 Uji Koefisien Determinasi 29
3.7.5 Matriks Klasifikasi 30
3.7.6 Analisis Regresi Logistik 30
3.7.7 Uji Hipotesis 31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 32
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 32
4.2 Hasil Penelitian 33
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif 33
4.2.2 Uji Regresi Logistik 35
4.2.3 Uji Goodness of Fit 37
4.2.4 Uji Koefisien Determinasi 37
4.2.5 Matriks Klasifikasi 38
4.2.6 Analisis Regresi Logistik 39
4.2.7 Uji Hipotesis 40
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 42
4.3.1 Pengaruh Rasio Kemandirian terhadap Opini Audit 43
4.3.2 Pengaruh Rasio Efektivitas terhadap Opini Audit 45
4.3.3 Pengaruh Rasio Efisiensi terhadap Opini Audit 47
4.3.4 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap Opini Audit 48
4.3.5 Pengaruh Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Opini Audit 50
BAB V PENUTUP 52
5.1 Kesimpulan 52
5.2 Saran 53
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kategori Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah 14
Tabel 2. 2 Kategori Rasio Efektivitas 15
Tabel 2. 3 Kategori Rasio Efisiensi 16
Tabel 2. 4 Kajian Empirik 19
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel 26
Tabel 4. 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif 33
Tabel 4. 2 Uji Likehood L Awal (Block 0) 36
Tabel 4. 3 Uji Likehood L Akhir (Block 1) 36
Tabel 4. 4 Hasil Uji Goodness of Fit 37
Tabel 4. 5 Uji Nagelkerke R Square 38
Tabel 4. 6 Tabel Matriks Klasifikasi 38
Tabel 4. 7 Hasil Uji Regresi Logistik 39
Tabel 4. 8 Hasil Uji Wald (Parsial t) 40
Tabel 4. 9 Hasil Uji Ombnibus Tes (Uji f) 42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Institusi pemerintah memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan. Berdasarkan *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific*, transparansi berarti keputusan yang diambil mengikuti aturan yang berlaku dan informasi terkait tersedia secara bebas serta dapat diakses oleh yang berkepentingan. Informasi tersebut harus disajikan dalam bentuk dan media yang mudah dipahami. Akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab dalam hal pengambilan keputusan, pelaksanaan tugas serta pertanggungjawaban atas hasil dari keputusan yang diambil. Keuangan negara harus dikelola dengan tertib sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pengelolaan yang baik ini berperan agar alokasi anggaran yang dilakukan tepat sasaran serta menjaga integritas dan akuntabilitas instansi. Penelitian oleh Masitha dan Mulyadi (2024) menyatakan pengelolaan keuangan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintahan mengenai uang negara digunakan dengan tepat dan sesuai sasaran.

Sejak era Reformasi, Indonesia mulai menerapkan prinsip *good governance*. *Good governance* pada dasarnya merupakan konsep yang merujuk pada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Konsep ini merupakan suatu kesepakatan yang dicapai oleh

pemerintah, warga negara, dan sektor swasta dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara (Radytia, 2023).

Good governance dapat dilihat dari kinerja pemerintah yang mencerminkan bagaimana pengelolaan negara dilakukan dengan baik (Wibisono dkk., 2024). Kinerja ini dapat diukur, salah satunya, melalui laporan keuangan**,** yang menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan dana publik. Laporan keuangan yang transparan dan efisien menunjukkan pengelolaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk kepentingan rakyat, serta mencerminkan akuntabilitas. Laporan keuangan menjadi alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah serta dasar dalam pengambilan keputusan (Masnun, 2018).

Kinerja pemerintah dapat diukur dengan menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi (Sari & Yousida, 2019). Ketiga rasio tersebut digunakan karena menunjukkan tingkat kemandirian pemerintah dalam mencapai hasil yang telah direncanakan serta optimalisasi proses yang dilakukan pemerintah dalam memperoleh pendapatan (Diansari dkk., 2022).

Rasio kemandirian mengukur sejauh mana pemerintah daerah dapat membiayai pengeluaran tanpa bergantung pada dana dari pusat. Tingkat kemandirian keuangan Provinsi NTT pada periode 2019-2023 menurut Hadia dkk. (2024) tercatat memiliki rata-rata 12,46%, memperlihatkan bahwa NTT masih sangat bergantung pada kucuran dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai berbagai belanjanya. Stabilitas rasio ini pada tingkat yang rendah selama tiga tahun berturut-turut menempatkan NTT dalam klasifikasi "Belum Mandiri,"

yang mengimplikasikan bahwa pemerintah daerah lebih banyak menerima arahan dan petunjuk dari pemerintah pusat.

Rasio efektivitas menilai sejauh mana pemerintah daerah mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian oleh Hadia dkk. (2024) Efektivitas keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada periode 2020 hingga 2022 dapat dikategorikan kurang efektif, dengan rata-rata rasio yang tercatat sebesar 78,5%.

Rasio efisiensi mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menggunakan sumber daya untuk mencapai hasil yang optimal. Analisis rasio efisiensi di provinsi NTT selama tiga tahun, dari 2020 hingga 2022, memperlihatkan rata-rata sebesar 12,54%. Angka ini mengindikasikan bahwa secara keseluruhan, efisiensi keuangan pemerintah Provinsi NTT tergolong cukup efisien.

Selain laporan keuangan, sistem pengendalian internal menjadi salah satu proses integral dari *good governace*. Sistem pengendalian internal merupakan proses yang termasuk ke dalam manajemen dasar yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Sebagai rangka dalam mewujudkan *good governance* maka laporan keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintah perlu untuk diperiksa.

Laporan keuangan diperiksa oleh Badan Pengurus Keuangan (BPK) sebagai auditor eksternal. Laporan akan dilihat apakah sudah memenuhi standar yang berlaku, serta mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Setelah diperiksa, BPK akan mengeluarkan opini auditor yang bertujuan memberikan penilaian objektif mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Sesuai dengan Undang-undang

Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, opini audit diantaranya; Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar, dan Pernyataan menolak memberikan pendapat.

Perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada pemerintah Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan adanya peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah yang tercermin dalam kenaikan opini WTP dari 89,5% pada tahun 2019 menjadi 91% pada tahun 2022 (Warta Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan, 2024). Meskipun ada peningkatan secara keseluruhan, bukan berarti pengelolaan keuangan pemerintah bebas dari masalah. Hasil pemeriksaan BPK masih menemukan adanya beberapa temuan terhadap laporan pemerintah daerah. Hal ini juga terjadi pada kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pada tahun 2020 masih terdapat empat pemerintah daerah yang memperoleh opini selain WTP. Jumlah tersebut menurun pada 2021 menjadi satu daerah hingga pada tahun 2022, untuk pertama kalinya bagi seluruh kabupaten/kota berhasil memperoleh opini WTP. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa catatan yang diberikan yang menjadi temuan oleh BPK. Sebagai contoh dalam LHP atas LKPD Kota Kupang pada tahun 2022 BPK menemukan permasalahan mengenai realisasi belanja pegawai yang melebihi anggaran yang telah ditetapkan dan pengelolaan kas yang belum memadai.

Penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya terhadap variabel-variabel menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Wibisono

dkk. (2024) menunjukkan rasio kemandirian berpengaruh terhadap opini audit, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kamila dkk. (2024) menunjukkan bahwa rasio kemandirian tidak berpengaruh terhadap opini laporan keuangan. Selanjutnya, penelitian oleh Syam dkk. (2023) menunjukkan bahwa rasio efisiensi berpengaruh terhadap opini audit sedangkan rasio efektivitas tidak berpengaruh. Hal ini berbeda dengan penelitian oleh Diansari dkk. (2022) yang menunjukkan bahwa rasio efektivitas berpengaruh terhadap opini audit sedangkan rasio efisiensi tidak berpengaruh. Hal serupa juga terjadi pada variabel Sistem Pengendalian Internal (SPI) Yusuf & Gustiana (2022) menemukan bahwa SPI memiliki berpengaruh terhadap opini audit, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mutiara dkk. (2022) SPI tidak berpengaruh.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Opini Audit pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur".

1.2 Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh dari rasio kemandirian terhadap opini audit?
2. Bagaimana pengaruh dari rasio efektivitas terhadap opini audit?
3. Bagaimana pengaruh dari rasio efisiensi terhadap opini audit?

4. Bagaimana pengaruh dari sistem pengendalian internal terhadap opini audit?
5. Bagaimana pengaruh dari rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan sistem pengendalian internal terhadap opini audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan yang akan diraih dari penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui bagaimana pengaruh rasio kemandirian terhadap opini audit.
2. Mengetahui bagaimana pengaruh rasio efektivitas terhadap opini audit.
3. Mengetahui bagaimana pengaruh rasio efisiensi terhadap opini audit.
4. Mengetahui bagaimana sistem pengendalian internal terhadap opini audit.
5. Mengetahui bagaimana pengaruh dari rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan sistem pengendalian internal terhadap opini audit.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka manfaat penelitian yang diharapkan sebagai berikut:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan antara kinerja keuangan dan sistem pengendalian internal terhadap opini audit. Selain itu penelitian ini dapat

memperkaya literatur mengenai pengelolaan keuangan di instansi pemerintahan

2. Bagi Objek Penelitian

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hubungan antara kinerja keuangan dan sistem pengendalian internal terhadap opini audit untuk meningkatkan atau mempertahankan opini atas laporan keuangannya.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji hubungan antara kinerja keuangan dan sistem pengendalian internal terhadap opini audit di instansi pemerintah lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 *Agency Theory*

Agency theory atau teori keagenan dijelaskan oleh Jensen & Meckling, (1976) merupakan hubungan dalam sebuah kontrak antara prinsipal dalam hal ini pemilik dengan agen yaitu pengelola bisnis. Kontrak ini bersifat formal dimana mengatur mengenai hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Anthony & Govindarajan (2007:530-531) mengemukakan bahwa teori keagenan adalah hubungan antara dua pihak, dalam hal ini prinsipal dan agen, dimana prinsipal memperkerjakan dan memberikan wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan serta bertindak atas nama perusahaan untuk kepentingan dari prinsipal. Pengambilan keputusan ini diiringi dengan tanggung jawab di mana agen bertanggungjawab sepenuhnya atas keputusan yang diambilnya kepada prinsipal. Dijelaskan lebih lanjut oleh Tandiontong (2016) tujuan dari hubungan ini yaitu pemilik mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin karena perusahaan dikelola oleh tenaga profesional dengan biaya seefisien mungkin.

Teori keagenan berlaku dalam semua bentuk organisasi, termasuk sektor publik (Jensen & Meckling, 1976). Hubungan dalam teori keagenan pada sektor publik lebih rumit daripada sektor privat (Streim, 1994). Dalam konteks sektor publik, hubungan prinsipal-agen tersusun dimulai dari masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai agen dan pemerintah sebagai prinsipal dan birokrasi sebagai agen (Moe, 1984).

Adanya dua peran dalam struktur pemerintahan membuat hubungan keagenan menjadi lebih kompleks dan tidak dapat terpisahkan (Halim & Abdullah, 2006). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah sebagai agen untuk bertanggung jawab dengan melaporkan kepada masyarakat karena telah mempercayakan aset kepada pemerintah (Ningsih, 2016).

Masalah keagenan dapat terjadi pada instansi pemerintahan. Masalah ini dapat timbul karena terjadinya asimetri informasi, di mana salah satu pihak dalam konteks ini yaitu pemerintah, memiliki informasi lebih banyak dibanding masyarakat mengenai keadaan sebenarnya (Farras & Faisal, 2020). Dua peran pemerintah dalam hubungan keagenan menimbulkan dua masalah yaitu keagenan pada eksekutif dan keagenan pada legislatif (Halim & Abdullah, 2006).

Masalah keagenan pada eksekutif kerap terjadi pada proses penyusunan anggaran. Pemahaman terhadap birokrasi, administrasi, dan regulasi pemerintahan, eksekutif memiliki posisi menyusun anggaran berdasarkan asumsi yang menguntungkan pihaknya. Keunggulan ini berasal dari keadaan faktual bahwa eksekutif menjadi pelaksana dari semua pemerintah. Keunggulan dalam informasi inilah menjadi asimetri infromasi (Halim & Abdullah, 2006).

Masalah keagenan pada legislatif terjadi karena perilaku oportunistik karena adanya peran ganda yaitu legislatif sebagai prinsipal dan agen. Dalam peran prinsipal, legislatif menyisipkan kepentingan pribadi melalui kebijakan. Pada peran agen dari masyarakat, legislatif seharusnya menyusun anggaran berdasarkan permasalahan dan kebutuhan masyarakat (Halim & Abdullah, 2006).

Untuk mengurangi asimetri informasi dapat dilakukan dengan pengawasan dan pemeriksaan oleh auditor. Auditor disini bertindak sebagai agen lainnya yang ditunjuk oleh prinsipal untuk menjalankan tugasnya, sehingga penting bagi auditor untuk bertindak independen (Streim, 1994).

2.1.2 Laporan Keuangan Sektor Publik

Menurut (Majid, 2019) laporan keuangan sektor publik merupakan laporan yang disusun untuk menggambarkan posisi keuangan yang berasal dari transaksi-transaksi yang telah dilakukan oleh sektor publik. Laporan bertujuan menciptakan akuntabilitas, di mana informasi yang disajikan kepada publik berguna bagi pemakai dan mengevaluasi alokasi sumber daya yang dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan.

Tujuan dari laporan keuangan yaitu kepatuhan terhadap peraturan, akuntabilitas, informasi otorisasi, serta sumber fakta dan gambaran dari sektor publik. Laporan keuangan digunakan untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan serta akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan (Hantono dkk., 2021). Komponen laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 Paragraf 28 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 berbasis akrual terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

   Berdasarkan SAP, “Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya yang dikelola oleh pemerintah

pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan". Unsur dari LRA yaitu pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)

   Berdasarkan SAP, "Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya".

3. Neraca

   Berdasarkan SAP, "Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu".

4. Laporan Operasional (LO)

   Berdasarkan SAP, "Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan".

5. Laporan Arus Kas (LAK)

   Berdasarkan SAP, "Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/ daerah selama periode tertentu".

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Berdasarkan SAP, “Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya”.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

   Berdasarkan SAP, “Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas”.

Organisasi sektor publik diwajibkan untuk membuat laporan tersebut. Selanjutnya laporan tersebut diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebelum diberikan kepada pihak legislatif.

2.1.3 Kinerja Keuangan Pemerintah

Ulum (2009:19-20) mengatakan bahwa pengukuran kinerja sangat krusial untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam memberikan layanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas tidak hanya sebatas menunjukkan penggunaan anggaran publik, tetapi juga kemampuan untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Oleh karena itu, penting bagi organisasi sektor publik untuk dapat membuktikan bahwa sumber daya yang ada telah dimanfaatkan secara optimal demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara informasi dalam memeriksa memiliki berbagai bentuk salah satunya kinerja

atau kondisi keuangan. Kinerja dapat berupa pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang tercermin dalam laporan keuangan. Menurut Pasal 1 Ayat 35 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, "Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur".

Pengukuran kinerja dalam sektor publik dapat dikelompokkan dalam dua kategori yaitu:

1. Informasi Finansial

   Penilaian laporan keuangan diukur dari anggaran yang telah dibuat. Penilaian ini menganalisis selisih dari kinerja (pendapatan dan pengeluaran) aktual dengan yang dianggarkan
2. Informasi Non finansial

   Penilaian dengan informasi non finansial dilakukan untuk menambah keyakinan terhadap kualitas dari pengendalian manajemen. (Ulum, 2009)

Pengukuran finansial dapat dilakukan dengan analisis rasio keuangan. Analisis ini diambil dari laporan keuangan (Ulum, 2009).

2.1.3.1 Rasio Kemandirian

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan operasional, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dengan menggunakan pendapatan yang berasal dari sumber daya lokal, seperti pajak dan retribusi. Tingkat kemandirian ini diukur melalui rasio yang menggambarkan

seberapa besar daerah tersebut bergantung pada bantuan dana dari pihak eksternal, yaitu pemerintah pusat atau provinsi (Ulum, 2009). Tingkat kemandirian suatu daerah dapat diukur sebagai berikut:

$$Rasio\ Kemandirian = \frac{PAD}{Bantuan\ Pusat/Provinsi}\ x\ 100\%$$

Sumber: Ulum (2009)

Semakin tinggi rasio kemandirian, maka menunjukkan tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah. Tingkat rasio kemandirian dapat dikategorikan pada tabel

Tabel 2. 1
Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian	Pola Hubungan
Sangat Rendah	0 - 25 %	Instruktif
Rendah	26 % – 50 %	Konsultatif
Sedang	51 % – 75 %	Partisipatif
Tinggi	75 % – 100 %	Delegatif

Sumber : Halim (2004)

Persentase 0 – 25 tergolong dalam pola hubungan instruktif, di mana pemerintah lebih banyak menerima arahan dan petunjuk dari pemerintah pusat, sehingga tingkat kemandirian sangat rendah. Pada persentase 26 – 50 tergolong dalam pola konsultatif yang menunjukkan campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang. Daerah ini dapat dikatakan sedikit lebih mampu dalam menjalankan otonomi daerah (Halim, 2004).

Persentase 51 – 75 tergolong dalam pola partisipatif, di mana arahan dari pemerintah pusat semakin berkurang karena tingkat kemandirian daerah semakin lebih tinggi. Pada pola ini daerah dikatakan hampir sepenuhnya mampu menjalankan urusan

otonominya. Tingkat persentase 76 – 100 tergolong dalam pola delegatif, di mana campur tangan pemerintah pusat/provinsi tidak ada lagi karena pemerintah daerah dianggap telah benar-benar mampu menjalankan urusan otonominya (Halim, 2004).

2.1.3.2 Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan sejauh mana suatu organisasi mampu merealisasikan pendapatan yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik pula kinerja pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan (Ulum, 2009). Rasio efektivitas dapat diformulakan sebagai berikut:

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pendapatan}{Target\ penerimaan\ Pendapatan} \text{ x } 100\%$$

Sumber: Ulum (2009)

Kriteria penilaian rasio efektivitas dapat dilihat di tabel 2.2.

Tabel 2. 2
Kategori Rasio Efektivitas

Tingkat Efektivitas	Kriteria
> 100 %	Sangat efektif
100 %	Efektif
90 % – 99 %	Cukup efektif
75 % – 89 %	Kurang efektif

Sumber: Halim (2004)

2.1.3.3 Rasio Efisiensi

Guna mendapatkan ukuran kinerja yang lebih baik, rasio efektivitas dibandingkan dengan rasio efisiensi. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi

pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah dapat dikatakan efisien jika rasio yang dicapai kurang dari 1 atau di bawah 100%, yang menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan lebih rendah dibandingkan pendapatan yang diterima (Ulum, 2009). Rasio efisiensi dapat diformulakan sebagai berikut:

$$Rasio\ efisiensi = \frac{Realisasi\ Belanja\ Daerah}{Realisasi\ Penerimaan\ Daerah}\ x\ 100\%$$

Sumber: Ulum (2009)

Kriteria penelitian rasio efisiensi dapat dilihat dalam tabel 2.3.

Tabel 2. 3
Kategori Rasio Efisiensi

Tingkat Efisiensi	Kriteria
<10 %	Sangat efisien
10 % – 20 %	Efisien
21 % – 30 %	Cukup efisien
31 % – 40 %	Kurang efisien
>40 %	Tidak efisien

Sumber: Mahmudi (2016)

2.1.4 Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, "Sistem Pengendalian Internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan".

Temuan dalam sistem pengendalian internal diidentifikasi sebagai kelemahan pengendalian internal. BPK mencatat pengendalian internal terkait dengan unsur

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan pengendalian intern.

Temuan ini berasal dari pemeriksaan keuangan maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan umumnya berkaitan dengan permasalahan yang tidak menimbulkan dampak finansial secara langsung

Hal ini sesuai dengan Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang menjelaskan mengenai sistem pengendalian internal (SPI) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi opini audit.

2.1.5 Opini Audit

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini adalah pernyataan profesional yang dikeluarkan sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini audit ini diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan badan audit eksternal dan independen yang dibentuk untuk mengawasi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pada Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini dikeluarkan oleh BPK didasarkan pada empat kriteria, diantaranya:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*)
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Interen.

Selanjutnya, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK memberikan empat jenis opini, yaitu:

a. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*Unqualified opinion*),

   Opini ini menandakan bahwa laporan keuangan tersebut sudah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan tidak salah saji dan diungkapkan secara wajar dalam segala aspek material.

b. Wajar Dengan Pengecualian (WDP/*Qualified opinion*)

   Opini ini diberikan jika laporan keuangan sebagian besar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, tetapi ada beberapa bagian tertentu yang tidak sesuai sehingga perlu diungkapkan auditor dalam bentuk pengecualian.

c. Tidak Wajar (TW/*Adverse opinion*),

   Opini ini diberikan apabila laporan keuangan instansi tidak disajikan dan diungkapkan secara wajar atau mengandung kesalahan sehingga tidak

mencerminkan posisi keuangan yang sebenarnya sesuai dengan standar yang berlaku.

d. Tidak Memberikan Pendapat (TMP/*Disclaimer opinion*)

Opini ini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak dapat diperiksa sesuai standar audit. Opini ini diberikan apabila auditor tidak menemukan bukti yang cukup untuk memberikan opini terkait laporan keuangan instansi tersebut.

2.2 Kajian Empirik

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik atau judul penelitian ini:

Tabel 2. 4
Kajian Empirik

Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
Determinasi Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten/Kota Sumatera Selatan Tahun 2018 - 2022; Alvina Syafa Kamila, Firmansyah, Edwin Frymaruah (2024)	Kuantitatif	Rasio kemandirian tidak berpengaruh terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah. Sementara itu rasio efektivitas dan efisiensi berpengaruh terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Tindak Lanjut Rekomendasi Sebagai Variabel Moderasi; Jifri Syam, Nur Azlina, dan Muhammad Rasuli (2023)	Kuantitatif	Opini audit laporan keuangan dipengaruhi oleh SPI, kepatuhan, dan efisiensi, namun tidak oleh efektivitas. Tindak lanjut rekomendasi memoderasi SPI dan kepatuhan, tapi tidak memoderasi efisiensi dan efektivitas di Sumatera Utara tahun 2018–2022.
Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Pemberian Opini BPK Pemerintah	Kuantitatif	Rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap pemberian opini

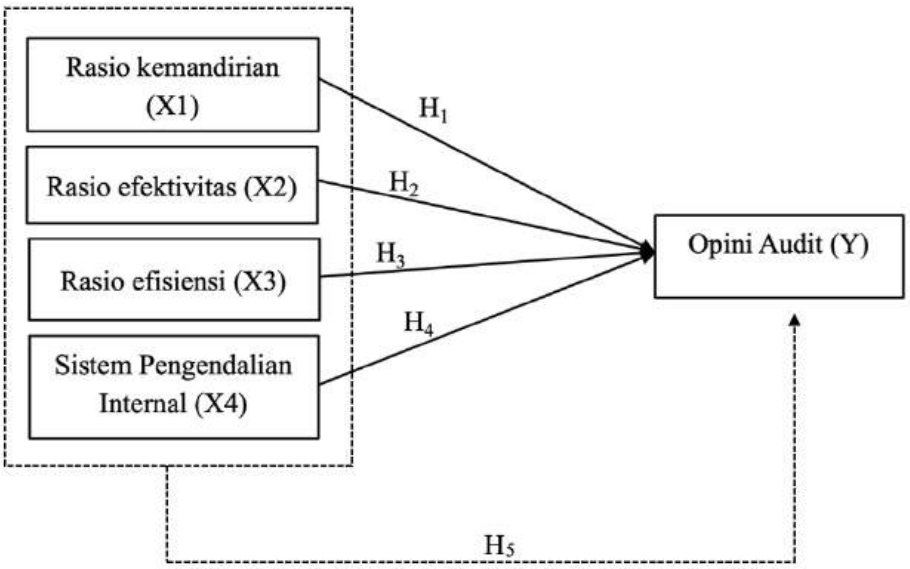
Provinsi/Kota/Daerah Di Pulau Jawa; Rani Eka Diansari, Asti Wulandari dan Dekeng Setyo Budiarto (2022)		oleh BPK. Sementara itu, rasio efisiensi belanja modal, rasio ketergantungan daerah, dan derajat desentralisasi tidak berpengaruh terhadap pemberian opini BPK
Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Ketidakpatuhan pada Perundang-Undangan dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan terhadap Opini Audit Pemerintah Daerah; Rizki Mutiara, Nelly Masnila, dan Nurhasanah (2022)	Kuantitatif	Ketidakpatuhan terhadap Perundang-Undangan sendiri tidak berpengaruh terhadap opini audit. Ketiga Secara bersama-sama, ketiga variabel memiliki pengaruh terhadap opini audit pemerintah daerah.
Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Opini Audit Pemerintah Pusat dengan Rekomendasi Audit Sebagai Variabel Moderasi; Muhammad Yusuf dan Nita Gustiana (2022)	Kuantitatif	Sistem pengendalian internal dan tindak lanjut audit berpengaruh terhadap opini audit, sedangkan kepatuhan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Tindak lanjut rekomendasi audit memperkuat pengaruh SPI tetapi tidak pada kepatuhan terhadap opini audit.

Berdasarkan tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa persamaan dalam penelitian ini terdapat pada variabel dependen yaitu opini audit. Perbedaan dari penelitian ini pada objek penelitian yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota Nusa Tenggara Timur dengan jumlah 21 kabupaten dan 1 kota.

2.3 Kerangka Berpikir

Penelitian ini menjelaskan mengenai pengaruh kinerja pemerintah dalam hal tingkat kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi, serta sistem pengendalian internal terhadap opini audit pemerintah daerah.

Gambar 2. 1
Kerangka Berpikir



Keterangan:

⟶ : Parsial

⇢ : Simultan

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh rasio kemandirian terhadap opini audit

Menurut Ulum (2009) kemandirian keuangan daerah mencerminkan sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan operasional, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Loni dkk. (2021) menyatakan bahwa keberhasilan otonomi daerah bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diansari dkk. (2022) yang menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah

berpengaruh terhadap pemberian opini BPK atas LKPD. Berdasarkan penjelasan yang dijelaskan di atas, maka hipotesis yang dirumuskan yaitu:

H_1: Rasio kemandirian berpengaruh terhadap opini audit

2.4.2 Pengaruh rasio efektivitas terhadap opini audit

Menurut Syam dkk. (2023) rasio efektivitas dapat mempengaruhi opini audit atas laporan keuangan pemerintah daerah. Efektivitas berkaitan dengan dampak dari suatu *output* terhadap pengguna jasa (konsumen). Untuk mengukur efektivitas suatu kegiatan, pengukuran didasarkan pada realisasi anggaran dengan kriteria yang telah ditetapkan dan disetujui sebelumnya. Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Diansari dkk. (2022), yang menunjukkan bahwa rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Opini BPK atas LKPD Pemerintah Prov/Kab/Kota di Pulau Jawa tahun 2016-2022. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dirumuskan yaitu:

H_2: Rasio efektivitas berpengaruh terhadap opini audit

2.4.3 Pengaruh rasio efisiensi terhadap opini audit

Syam dkk., (2023) mengatakan bahwa rasio efisiensi mempengaruhi opini audit laporan keuangan pemerintah. Efisiensi mengacu pada rasio antara *ouput* dengan *input*, yaitu realisasi pengeluaran dengan anggaran. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian (Wibowo dkk., 2019) bahwa rasio efisiensi berpengaruh terhadap pemberian opini BPK. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dirumuskan yaitu:

H_3 : Rasio efisiensi berpengaruh terhadap opini audit

2.4.4 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap opini audit

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, sistem pengendalian internal merupakan proses yang terintegrasi dalam tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Setiawan, (2019) mengatakan tujuannya dari pengendalian internal ini untuk memberikan jaminan yang cukup terhadap tercapainya sasaran organisasi, melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kusumawati & Ratmono (2017) mengemukakan bahwa kelemahan dalam sistem pengendalian internal menunjukkan bahwa agen tidak merancang atau tidak melaksanakan sistem pengendalian dengan baik. Semakin banyak temuan dalam sistem pengendalian internal, semakin buruk pula opini yang diberikan atas laporan keuangan agen. Hal ini sejalan dengan penelitian Kusumawati & Ratmono (2017) bahwa kelemahan SPI memiliki pengaruh terhadap opini audit. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis dirumuskan sebagai:

H_4 : Sistem Pengendalian Internal (SPI) berpengaruh terhadap opini audit

2.4.5 Pengaruh Rasio Kemandirian, Rasio Efisiensi, Rasio Efektivitas dan Sistem Pengendalian Internal terhadap opini audit.

Opini audit atas laporan keuangan pemerintah daerah tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor tunggal, melainkan dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek yang mencerminkan kinerja keuangan dan akuntabilitas pemerintah daerah secara keseluruhan. Rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan sistem pengendalian

internal merupakan indikator yang umum digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola sumber daya secara mandiri, efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dkk. (2019)menunjukkan bahwa faktor-faktor kinerja keuangan seperti rasio kemandirian, efektivitas, dan efisiensi dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan yang pada akhirnya berdampak terhadap opini audit. Sementara itu, penelitian oleh Mutiara dkk. (2022) menambahkan bahwa sistem pengendalian internal yang kuat merupakan salah satu syarat penting dalam memperoleh opini audit yang baik, karena mencerminkan keandalan proses pencatatan dan pelaporan keuangan.

H_5 : Rasio Kemandirian, Rasio Efisiensi, Rasio Efektivitas dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap opini audit.